

## Gereja dalam Realitas Sosial Indonesia Masa Kini

Ezra Tari, Jeni Isak Lele

Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur

[tariezra@gmail.com](mailto:tariezra@gmail.com), [isakleleneni@gmail.com](mailto:isakleleneni@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to discover the function of the church in present-day reality. The church is confronted with self-actualization in today's complex context. The writer wants to show off the principle of the church which is constantly being renewed. The church as an organism is willing and able to transform social conditions. The method used in this research is qualitative research with a literature review approach. The approach emphasizes the research for theoretical studies and values that develop based on scientific studies. The writer concluded that, the church must be involved in nation-building; renewal in all aspects of human life; the church contributes to upholding the law, human rights, and the role of women; the church becomes a place to uphold honesty, justice and truth.*

**Keywords:** *church; church in Indonesia; church's role; reactualization; social reality*

**Abstrak:** Kajian tulisan ini bertujuan menemukan fungsi gereja dalam realitas masa kini. Gereja diperhadapkan kepada reaktualisasi diri dalam konteks masa kini yang kompleks. Penulis hendak menyuarakan lagi prinsip gereja yakni terus-menerus diperbaharui. Gereja sebagai organisme mau dan mampu mentransformasi kondisi sosial. Cara yang digunakan dalam penelitian adalah prinsip kualitatif dengan pendekatan telaah literatur. Pendekatan menekankan penelusuran kajian teoritis dan nilai yang berkembang berdasarkan kajian ilmiah. Penulis memberi kesimpulan bahwa, gereja harus terlibat dalam pembangunan bangsa; pembaruan dalam seluruh aspek kehidupan manusia; gereja turut andil dalam menegakkan hukum, Hak Asasi Manusia, dan peran perempuan; gereja menjadi wadah menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan kebenaran.

**Kata kunci:** gereja; gereja di Indonesia; reaktualisasi; peran gereja; realitas sosial

### 1. Pendahuluan

Gereja dipanggil untuk berkarya di tengah dunia yang terus berubah dengan cepat. Dalam memahami keberadaannya itu gereja kembali disadarkan bahwa ia mengemban tugas yang sama dan tidak berubah, yaitu mengabarkan Injil yang utuh dan menyeluruh. Dalam bagian ini peneliti akan menguraikan realitas sosial masa kini di Indonesia ketika gereja hadir di dalamnya. Gereja sebagai persekutuan yang sedang diutus Tuhan untuk berkarya dan berkiprah di tengah dunia, tidak bisa tidak harus menjadi sebuah komunitas yang berinteraksi, berelasi, bahkan memainkan peran di setiap aspek kehidupan termasuk dalam bidang sosial. Dalam konteks pelayanannya gereja harus memiliki visi yang jelas tentang realitas kehidupan sosial. Sebab itu gereja bukan sebuah persekutuan yang statis, yang diam.

Gereja adalah persekutuan yang dinamik dan kreatif karena gereja mengemban tugas pelayanan di tengah realitas dunia ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa gereja-gereja di Indonesia lahir dalam konteks sosial yang terpisah-pisah. Keterpisahan ini menyebabkan adanya kebiasaan untuk berpikir sendiri-sendiri. Menurut John Titaley Gereja memikirkan

dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di daerah lain.<sup>1</sup> E. G. Sunggih mengatakan bahwa pemerintah adalah teman gereja. Ini dibuktikan dengan diundangnya tokoh pemerintahan dalam setiap persidangan gereja. Persidangan gereja belumlah lengkap jika tidak dihadiri oleh wakil dari pemerintah.<sup>2</sup> Gereja cenderung membiarkan negara terlalu campur tangan. Sebaliknya, gereja kurang campur tangan, ketika kekuasaan telah diselewengkan, keadilan tidak dilaksanakan. Gereja pada umumnya hanya selalu berkata bahwa pemerintah adalah wakil Allah dan gereja harus tunduk dan hormat, sehingga gereja tidak lagi menyuarakan suara profetisnya yaitu mengkritik dengan keras pejabat-pejabat yang korupsi, kolusi, dan nepotisme dan yang dengan sewenang-wenang menggunakan kekuasaan untuk menindas rakyat kecil. Gereja-gereja pun diporakporandakan dan diintervensi oleh penguasa, namun gereja dan para pemimpinnya hanya dapat berkata berdoa dan bersabar tanpa ada sikap untuk mengadakan pembelaan sebagai suatu protes terhadap kesewenangan penguasa.

Di era reformasi sekarang ini terkesan gereja mencoba membangun pola hubungan yang baru, meskipun belum terlalu signifikan. Tetapi setidaknya dapat dikatakan bahwa sudah ada pembaharuan dalam pola hubungan antara gereja dan negara. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pesan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) pada awal reformasi, kondisi yang kini dihadapi bangsa Indonesia seperti ketertutupan dan macetnya komunikasi politik, yang memudahkan tersulutnya keresahan, dan aspirasi rakyat semakin tersumbat. Negara ini perlu segera diselamatkan dari kekuasaan yang dikendalikan hanya untuk kepentingan sebagian masyarakat dan mengorbankan hak-hak serta kepentingan sebagian lainnya. Sangat memprihatinkan bahwa isu SARA telah menjadi kendaraan dari frustrasi rakyat yang secara potensial dapat menjadi faktor disintegrasi bangsa ini.<sup>3</sup> Meskipun pembaharuan dalam pola hubungan masih lebih banyak sebatas wacana, tetapi setidaknya dapat dikatakan bahwa fungsi kritis gereja terhadap negara dalam era reformasi telah ada dibanding masa pra reformasi.

A.A. Yewanggoe, dalam Konsultasi Teologi dan Pendidikan Teologi di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 23-28 November 1970 menjelaskan tentang dasar pemikiran teologi bagi gereja dan persoalan-persoalan sosial setelah kemerdekaan. Bahwa gereja-gereja di Indonesia harus mulai memeriksa ulang secara kritis warisan teologi yang dianutnya.<sup>4</sup> Selain itu relasi antara gereja dengan negara ini perlu dikontekstualisasikan pula di dalam hubungan antara gereja, negara, dan pasar. Secara sosiologis, pasar adalah gejala sosial yang dipengaruhi oleh relasi sosial dan persaingan status. Sehingga pasar

---

<sup>1</sup>John. A. Titaley, "Hubungan Gereja Dan Negara," in *Hubungan Gereja Dan Negara Dan Hak-Hak Asasi Manusia Hak-Hak Asasi Manusia*, ed. Weinata Sairin and J.M Pattisina (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996). 39.

<sup>2</sup>Emanuel Gerrit Singgih, *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000). 10

<sup>3</sup>*Pesan Majelis Pekerja Harian PGI kepada Pimpinan Para Anggota DPR RI dan MPR RI Berkenaan dengan Pelaksanaan Sidang Umum MPR RI 1-11 Maret 1999.*

<sup>4</sup>Rudy Harold, *Protestan Indonesia Di Gorontalo (GPIG) Dalam Menanggapi Masalah Kemiskinan*, *Jurnal Jaffray*, vol. 15, 2017.

bersama dengan organisasi bisnis dan gejala ekonomi lainnya senantiasa tertanam di dalam masyarakat dan bukan berada di luar struktur-struktur sosial yang lain.<sup>5</sup>

Dalam hal ini kedudukan gereja mengalami penyimpangan dari organisasi yang melayani kebutuhan umat menjadi organisasi yang membela orang miskin. Ada peralihan mengenai kecenderungan beragama yang awal mula hanya terhenti pada masalah ajaran dan norma saja, kepada teologi yang menelusuri tentang solusi pada persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat.<sup>6</sup> Pada bidang hukum, gereja mendampingi umat untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai iman Kristen.<sup>7</sup> Kuyper dalam bukunya *Iman Kristen dan Problema Sosial* mengingatkan bahwa iman Kristen yang sebenarnya harus terintegrasi secara holistik dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Kuyper, ketika seorang Kristen hidup berdasarkan prinsip Kitab Suci, maka ia harus mengamati dan mengurus kehidupan sosial agar menjadi lebih baik bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan mengenai gereja dan problematika sosial yang dihadapinya, maka penulis akan membahas mengenai gereja menyikapi realitas sosial yang ada di Indonesia kini dan di sini. Penelusuran mengenai sikap gereja akan di bahas berikut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pandangan mengenai sikap gereja terhadap problematika sosial yang dihadapinya.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan penelaahan literatur. Telaah literatur menggunakan cara pengoleksian data terhadap buku, catatan, dan laporan mengenai persoalan yang ingin diselesaikan.<sup>9</sup> Analisis data, menurut Neuman dapat dilaksanakan dengan memakai pola, seperti ragam perihal sama dan pembuat perbedaan.<sup>10</sup> Studi kepustakaan berusaha menelusuri penyelidikan teori, sumber pustaka, dan penelitian terdahulu yang saling mengkait dengan situasi sosial, sifat-sifat dan kaidah yang menjadi banyak dalam kondisi sosial yang diteliti.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup>Franciscia SEE Seda, "Gereja Dan Negara: Refleksi Atas Tantangan Masyarakat Indonesia Dan Pancasila Suatu Pendekatan Sosiologis," *Orientasi Baru* 22, no. 2 (October 2013): 155–186.

<sup>6</sup>Wasisto Raharjo Jati, "Agama Dan Politik: Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama," *Walisongo* 22, no. 1 (2014): 133–156.

<sup>7</sup>Ni Nyoman Fransiska, "Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen)," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* (2018): 1–15.

<sup>8</sup>Yunus Daniel Anus Laukapitang, "Teologi Pembangunan Berbasis Pengembangan Masyarakat Shalom Pada Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Kupang Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Jaffray* 14, no. 2 (September 2016): 241. Band: Harls Evan Siahaan, "Mengajarkan Nasionalisme Lewat Momentum Perayaan Paskah : Refleksi Kritis Keluaran 12 : 1-51," *Dunamis : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1, no. 2 (2017): 140–155, <https://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/119>.

<sup>9</sup>Abdi Mirzaqon T and Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expresive Writing," *Jurnal BK UNESA* 8, no. 1 (2017): 1–8.

<sup>10</sup>Martinus Ngabalin, "Berteologi Kontekstual Dari Perspektif Orang Kei Melalui Konsep Duad," *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (December 2019): 277–293.

<sup>11</sup>Mirzaqon T and Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expresive Writing. 8.

### 3. Pembahasan

#### Realitas Sosial yang Utama: Demokrasi

Victor Silaen mengatakan bahwa hingga kini belum ada alternatif pemikiran yang menandai kelebihan dan keunggulan demokrasi sebagai sistem untuk kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Memang demokrasi tidak menciptakan surga dalam kehidupan dunia, tetapi setidaknya di dalamnya individualitas setiap orang dihargai<sup>12</sup>. Tak dapat dipungkiri bahwa kehidupan berdemokrasi di Indonesia pada era reformasi sedikit lebih baik daripada masa sebelumnya. Pada masa pemerintahan Gus Dur, beliau benar-benar bertekad menegakkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika pada masa pra reformasi suara rakyat sering tidak didengar, maka dalam era pemerintahan Gus Dur keadaan menjadi sebaliknya. Semua orang diberi hak untuk bersuara. Sayangnya demokrasi seringkali disalahartikan, sehingga kemudian muncullah tindak-tindak kekerasan, di mana setiap individu atau golongan demi membela kepentingannya seringkali tidak mau tahu dan peduli dengan yang lain.

Dalam era reformasi belum terlalu ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan bergereja. Menurut E.G. Singgih, pada masa lalu gereja dan persekutuan Kristen seringkali salah paham menganggap diri sudah peduli dengan masyarakat. Padahal yang dijadikan mitranya adalah pemerintah dan kalangan atas, dengan anggapan bahwa itulah masyarakat. Akibatnya gereja tidak pernah menunjukkan kepedulian terhadap rakyat di lapisan bawah. Gereja memang sudah banyak membantu rakyat miskin dengan sedekah tetapi gereja kurang mendengarkan suara mereka. Tanpa belajar mendengarkan suara rakyat miskin gereja jadi kurang memperjuangkan kepentingan mereka, melainkan kepentingan orang kaya.<sup>13</sup>

Ada perubahan dalam kepedulian Gereja terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Gereja saat ini sedang berusaha bersama pemerintah menegakan kehidupan demokrasi sosial di Indonesia yang bersendikan paham kolektivisme atau kebersamaan. John W. De Gruchy mengajak warga gereja ikut berpartisipasi aktif berlandaskan kepada visi profetis. Visi profetis meliputi penegakan keadilan dengan syalom dan kasih, mewujudkan nyata atau menghadirkan kasih Yesus dan implementasi Kerajaan Allah, dan supaya menjadi komunitas yang tidak membuat pembedaan-pembedaan strata kehidupan.<sup>14</sup> Zakaria Ngelow mengatakan bahwa gereja sebagai sebagai seyogyanya tidak diseret masuk politik praktis, agar tidak turut pada orang yang berkuasa, dan tidak kehilangan wibawa dalam menyatakan kehendak Allah terhadap penyalagunaan kekuasaan.<sup>15</sup>

#### Aspek Golongan Sosial

Kompleksitas dalam masyarakat Indonesia yang terkotak-kotak dalam golongan sosial merupakan bagian dari realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam realitas seperti

---

<sup>12</sup>Eka Darmaputera and Victor Silaen, *Gereja Dan Reformasi: Pembaharuan Gereja Menuju Indonesia Baru* (Jakarta: Yakoma-PGI, 2009). 91

<sup>13</sup>Singgih, *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi*. 51

<sup>14</sup>Aseng Yulias Samongilailai, "Visi Profetis Bagi Kehidupan Sosial Umat Kristen Dalam Demokratis Menurut John W. De Gruchy," *Epigraphe: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 3, no. 2 (December 2019): 118–132.

<sup>15</sup>Victor Silaen, "Kristen Dan Kenaifan Politik: Kritik Atas Sikap Politik PGPI Dalam Pilpres 2014," *Societas* 2, no. 1 (2015): 161–208.

ini seringkali tercipta sifat dan sikap individualistik yang eksklusif pada kehidupan masyarakat. Sikap primordial, eksklusif dan individual mulai menonjol dengan munculnya sikap sukuisme, mau menang sendiri, sistem kasta dan pengkotakan dalam masyarakat. Hal ini juga yang menciptakan kesenjangan sosial dalam realitas hidup bermasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, selaras dengan derajat sosial dan kebudayaan, maka ditemukan tiga klasifikasi masyarakat di Indonesia; yang dikutip dari Selo Sumarjan, yaitu 1) masyarakat bersahaja; 2) masyarakat menengah dan 3) masyarakat yang berpikir sesuai tuntutan zaman.<sup>16</sup> Dalam struktur kehidupan sosial masyarakat seperti ini seringkali timbul berbagai konflik karena ada kesenjangan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Rancangan klasifikasi sosial dipahami sebagai susunan yang membentuk lapisan dan struktur hubungan antara orang-orang yang terikat dalam sistem sosial dan dibatasi oleh norma-norma atau bentuk perilaku yang disepakati bersama.<sup>17</sup>

### **Kemajemukan Agama**

Kemajemukan masyarakat dapat dilihat dari segi etnik, budaya, dan agama. Padahakekatnya kepelbagaian merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya kemajemukan tersebut maka, manusia sesuai penganut agama yang berbeda seyogyanya mampu berkontestasi dalam meningkatkan kebaikan dalam hidup ini.<sup>18</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajemukan agama merupakan salah satu aspek yang mewarnai wajah Indonesia di mata dunia. Pada era reformasi di bawah pemerintahan Gus Dur Konghucu kemudian diterima sebagai salah satu dari agama-agama resmi di Indonesia. Akan tetapi kemajemukan agama di Indonesia tidak hanya terbatas pada berbagai agama. Kepelbagaian aliran, paham atau kelompok ada dalam tiap-tiap agama.

Di kalangan Islam misalnya ada dua golongan yaitu *Mazhabiah* dan *Salaviah*. Di kalangan Protestan kebergaman internal ditandai dengan kehadiran berbagai gereja yang tergabung dalam berbagai wadah antara lain: PGI, PGLII dan DPI. Di samping itu juga masih ada gereja-gereja baru yang datang dari luar seperti Amerika dan Eropa serta munculnya kelompok-kelompok Kharismatik. Inilah salah satu realitas yang menjadi konteks realitas kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Meskipun demikian, salah satu hal yang menarik yang perlu dicatat dalam masa pra reformasi adalah terbukanya dialog antara kekeristenan dengan agama-agama yang lain dan juga dialog interen gereja sendiri. Ada tiga cara yang dapat digunakan yakni, teologi, politik dan kebudayaan. Penerapan dari pendekatan-pendekatan tersebut sangat diperlukan dalam membangun dialog.<sup>19</sup> Dalam era reformasi ini, kedua realitas inilah yang menjadi konteks gereja hidup dan berada.

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Struktur Masyarakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993). 49

<sup>17</sup>Qoriah Saleha, "Kajian Struktur Sosial Dalam Masyarakat Nelayan Di Pesisir Kota Balikpapan," *Buletin PSP* 21, no. 1 (2013): 67–75.

<sup>18</sup>Mawardi, "Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Kemajemukan Sosial," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (April 2015): 55–66.

<sup>19</sup>Khotimah, "Dialog Dan Kerukunan Antar Umat Beragama," *Jurnal Ushuluddin XVII*, no. 2 (July 2011): 214–224.

## **Pendidikan**

Masalah pendidikan mempunyai posisi dan peran penting dalam rangka kehidupan bermasyarakat dan keberlangsungan bangsa. Realitas di bidang pendidikan dalam era reformasi ini ternyata lebih menjurus pada krisis. Meski angka sering tidak menunjukkan fakta, namun dengan mata telanjang dapat dilihat penurunan kualitas manusia Indonesia terjadi di mana-mana. Hal ini dapat dilacak dari kondisi masyarakat kelas bawah yang tidak dapat lagi menjangkau pelayanan kesehatan, tidak dapat lagi membeli kebutuhan pokok sehari-hari dengan layak, dan tidak dapat lagi menjangkau pelayanan pendidikan.

Orang banyak kemudian dengan mudah mempertanyakan tentang dunia pendidikan, bahkan menuding bahwa pendidikan tidak berhasil mendidik bangsa ini. Padahal dunia pendidikan juga memiliki masalah-masalah yang tidak kecil dan sederhana. Secara kuantitatif dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan. Indikator pencapaiannya dapat dilihat pada kemampuan baca tulis masyarakat yang mencapai 67,24%.<sup>2</sup> Hal ini sebagai akibat dari program pemerataan pendidikan, terutama melalui IMPRES SD yang dibangun oleh rezim Orde Baru. Namun demikian, keberhasilan dari segi kualitatif pendidikan di Indonesia belum berhasil membangun karakter bangsa yang cerdas dan kreatif apalagi unggul.<sup>20</sup>

Mutu pendidikan adalah aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pemerataan dan perluasan kesempatan belajar. Asumsinya, perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu akan mendorong terwujudnya kelompok masyarakat yang bermutu. Relevansi pendidikan berkaitan dengan sejauhmana lulusan suatu sekolah dapat langsung diserap oleh dunia kerja pada umumnya lebih-lebih dewasa ini perkembangan iptek berjalan dengan amat cepat. Masalah relevansi secara umum lebih mengarah pada pendidikan kejuruan dan profesional yang berorientasi pada penyiapan tenaga kerja terdidik pada berbagai tingkatan untuk mengisi kesempatan kerja. Permasalahan akibat pengelolaan pendidikan yang sangat sentralistis, kurang berkembangnya kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola sektor pendidikan di daerah. Selain itu, selama ini sekolah juga tidak mempunyai otonomi dalam mengelola sekolah, sekolah hanya menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Soal pembiayaan tidak terlalu mudah apalagi jika sekolah-sekolah tidak memiliki kreativitas dalam menggalang dana di tengah masyarakat. Masalah-masalah makro dunia pendidikan akan lebih rumit dan kompleks lagi jika lebih menitik pada problema yang dihadapi oleh sekolah-sekolah Kristen khususnya dalam mengimplementasi UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada UU No 20 Tahun 2003 eksistensi perguruan swasta terdapat dalam Pasal 55 Ayat (1) masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama...Penjelasan ayat tersebut: "Kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini". Pasal ini memberikan dasar yang kukuh dan legitim bagi sekolah-sekolah Kristen untuk memberikan kontribusi optimal dan terbaik bagi upaya

---

<sup>20</sup>Nurul Afifah, "Problematika Pendidikan Di Indonesia (Telaah Dari Aspek Pembelajaran)," *Elementary* 1, no. 1 (2015): 41–47.

pencerdasan bangsa. Dalam peraturan pemerintah mesti terjamin bahwa sekolah-sekolah Kristen memiliki otonomi, kemandirian untuk mengekspresikan ciri-khasnya dengan leluasa. Pemerintah dan masyarakat menghargai dan menjamin eksistensi sekolah Kristen berdasarkan undang-undang. Cara penyampaian bentuk kolaboratif bisa diterima tanggapan terhadap tantangan-tantangan di bidang pendidikan Kristen, terutama teori ilmu pengetahuan. Praktisi pendidikan Kristen yang membentangkan perilaku kritis terhadap kerangka pikir yang dibentuk dalam lingkungan sekolah.<sup>21</sup>

Pendidikan Kristen perlu dibangun dengan mengembangkan yakni, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, ada visi dan target mutu yang ingin dicapai, ada kepemimpinan yang kuat, adanya komitmen dari kepala sekolah, guru, dan para siswa untuk berprestasi, adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus sesuai dengan tuntutan iptek, adanya pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu, dan adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orangtua murid/masyarakat.

Hal yang terpenting dalam bidang ini terlepas dari berbagai kekurangannya, gereja pada era reformasi secara tegas menyatakan bahwa bidang pendidikan merupakan salah satu medan pelayanan dan kesaksian umat Kristen.<sup>22</sup> MPK dan PGI melaksanakan Konsultasi Nasional gereja dan Pendidikan, 19-21 Mei 2016 di Surabaya, mendiskusikan mengenai gereja dan Sekolah Kristen agar turut serta membuat gerakan revolusi mental yang diusahakan oleh negara. Kedua, bagaimana memperbanyak dan meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan guru sekolah minggu. Ketiga, bagaimana memperlengkapi para pengurus yayasan, kepala sekolah, guru dan orangtua murid sesuai dengan panggilan dan peran masing-masing. Keempat, bagaimana mendorong dan menggerakkan anak-anak muda agar sedia menjadi guru, terutama menjadi *volunteer*, untuk jangka pendek maupun panjang. Kelima, upaya menggalang dana pendidikan dan memberdayakan sekolah-sekolah Kristen yang ada.

Konas ini diikuti oleh 280 peserta dari unsur pimpinan gereja dan lembaga-lembaga pendidikan kristen (TK hingga sekolah menengah).<sup>23</sup> Adapun Visi dan Misi pendidikan dirumuskan yakni, pertama, pendidikan kristiani yang membentuk manusia yang dewasa secara rohani, tumbuh secara holistik dan melaksanakan tugas-tugas secara bertanggung jawab kepada Allah dan masyarakat sekitarnya. Serta memiliki kompetensi handal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi pendidikan Kristen yakni, pertama, mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran dan pelatihan, yang mengintegrasikan kebenaran Tuhan, untuk menumbuhkan kembangkan potensi-potensinya. Kedua, mengembangkan dan melaksanakan berbagai program untuk memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat di mana lembaga itu berada. Ketiga, menyediakan tenaga pendidikan, pengelola dan pengajar yang memiliki komitmen pada visi pendidikan Kristen, menghargai sesama manusia. Keempat,

---

<sup>21</sup>Tan Giok Lie, "Suatu Model Kolaboratif Pendidikan Kristen Terhadap Tantangan Paradigmatik Era Ini," *Stulos* 16, no. 2 (2018): 142-158.

<sup>22</sup>Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, *Carilah Tuhan Maka Kamu Akan Hidup* (Jakarta: Akademi Leimena, 1999). 128

<sup>23</sup>Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, "Gereja Dan Dunia Pendidikan," *Web PGI*.

menyediakan fasilitas yang terbaik yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Kelima, terus menerus meningkatkan mutu, serta memperhatikan sumber kesejahteraan sumber daya manusianya sebaik-baiknya.<sup>24</sup>

### ***Ekonomi***

Krisis moneter yang terjadi pada tahun terakhir pemerintahan presiden Soeharto membawa dampak pada krisis ekonomi dan krisis ekonomi membuat stagnasi ekonomi yang mengakibatkan krisis pengangguran yang berujung pada kemiskinan. Menurut Muhammad Sofyan, desakan yang kuat terhadap perekonomian menambah beban berat terhadap kehidupan masyarakat. Lonjakan harga kebutuhan pokok telah membuat kesejahteraan masyarakat menurun dengan cepat. Kerusakan yang terjadi pada awal era reformasi ternyata dilatar belakangi oleh lonjakan harga di beberapa kota.<sup>25</sup>

Krisis yang dihadapi ini yang berawal dari krisis moneter yang merambat menjadi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan telah memperburuk wajah perekonomian Indonesia. Di samping besar dan beratnya hutang luar negeri, nilai tukar rupiah yang jatuh di pasaran keuangan dunia memperburuk neraca pembayaran. Korupsi juga semakin menjadi. Kolusi pengusaha dan penguasa telah membuat birokrasi menjadi mesin pemerintahan yang lamban dan korup. Tidak ada lagi pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Keadaan ekonomi Indonesia menjadi morat-marit dengan struktur yang rapuh, kemiskinan semakin meluas karena pendapatan perkapita penduduk sangat rendah sebagai imbas pertumbuhan ekonomi rendah sedangkan inflasi semakin tinggi. Perlu dipertanyakan kembali apakah Gereja secara kelembagaan dengan berbagai organisasi-organisasi, para pengusaha Kristen telah menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

### ***Hukum***

Kondisi Indonesia, penegakan hukum dan HAM sudah diamanatkan dalam Pancasila dan undang-undang dasar (UUD) 1945. Penjelasan UUD 1945 ditegaskan, Indonesia adalah wilayah yang memakai hukum sebagai dasar. Tetapi dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, idealisme Indonesia sebagai negara hukum ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Marzuki Darusman: dalam negara Indonesia, demokrasi tidak berjalan, keadilan tidak diwujudkan, kedaulatan rakyat tidak diwujudkan secara optimal di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara tidak diberlakukan secara fungsional dan koordinatif di antara lembaga-lembaga tinggi negara, pembagian dan pembatasan kekuasaan tidak jelas konsep dan penerapannya, sehingga hukum dan HAM menjadi tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Yang terjadi adalah krisis hukum dan HAM dalam berbagai hal, di mana krisis itu pada dasarnya terkait dengan masalah mendasar yaitu tidak diletakan dan dibangunnya hukum dan HAM.<sup>26</sup>

Realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pendapat di atas adalah tepat. Keadilan tidak memihak kepada rakyat miskin dan kebenaran acap dicampakan. Pelang-

---

<sup>24</sup>Ibid, 129-130.

<sup>25</sup>Muhammad Sofyan, *Agama dan Kekerasan dalam bingkai Reformasi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999). 61.

<sup>26</sup>Marzuki Darusman, *Penegakan Hukum Dan HAM Di Era Reformasi* (Jakarta: LP3S, 2000). 73

garan HAM berjalan di berbagai tingkatan dan lapisan, terutama di kalangan rakyat bawah yang miskin dan terkebelakang. Rakyat kecil selalu berada pada pihak yang tersisih, tertindas, terbuang, yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membela diri, karena tidak memiliki akses langsung ke lembaga-lembaga hukum dan peradilan. Pelanggaran HAM berlangsung dalam berbagai bidang, bentuk dan cara. Berbagai pelanggaran ini sering diwarnai atau dilakukan dengan kekerasan, bahkan budaya kekerasan sudah hampir merasuki dan mentradisi dalam bidang hukum dan HAM. Memajukan hukum dan HAM sebenarnya merupakan tugas Gereja juga. Tetapi dalam kesehariannya, terkadang Gereja memakai kekuasaan negara untuk menindas orang lain. Gereja cenderung hanya bersuara ketika kepentingannya terganggu atau hanya dilanggar. Di pihak lain, Gereja sering terjebak pada kutipan Roma 13 tentang kepatuhan kepada pemerintah, sehingga daya kritis Gereja terhadap ketidakberesan pemerintahan dalam menegakan Hukum dan HAM kurang sekali. Hal ini membuat daya kritis warga Gereja untuk menyampaikan koreksi kepada pemerintah tidak berkembang.

### ***Kaum Perempuan***

Di era reformasi sekarang ini, peranan kaum perempuan dalam semua segi kehidupan sudah nampak. Bahkan posisi-posisi penting dalam pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat berada dalam jabatan kaum perempuan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa secara umum kedudukan perempuan belum terlalu seimbang dengan kaum Adam. Perempuan mempunyai kebebasan bertindak dalam menentukan pilihan berkegiatan di masyarakat dan cenderung berperan serta di beberapa aktivitas sekaligus. Peran serta di berbagai pekerjaan sekaligus, bukan hanya sekadar untuk mendistribusikan aspirasi saja, tetapi alat untuk proses sosialisasi diri bagi perempuan dan upaya membentuk identitas baru. Peran yang bukan hanya sebagai ibu dan istri saja, melainkan juga melaksanakan keaktifan sosial sebagai warga.<sup>27</sup> Masih ada stereotip-stereotip yang dilekatkan terhadap kaum perempuan.

Realitas kehidupan perempuan memang masih dibalut kesuraman, meski kesadaran untuk memberi peran yang seimbang kepada kaum perempuan terus diperjuangkan. Menurut Hetti Siregar, hingga saat ini masih banyak kaum perempuan yang ditindas dan dieksploitatif tenaganya. Menurutnya hal ini disebabkan karena, pertama, masih ada perempuan tradisonal yang beranggapan bahwa perempuan layak memakan sisa makanan keluarganya. Kedua, suara perempuan tidak didengar, di keluarga, di masyarakat dan di gereja. Ketiga, perempuan dianggap lemah, tidak rasional, emosional. Segala yang buruk ada pada perempuan. Itulah stereotip perempuan yang tentunya diciptakan oleh laki-laki melalui budaya, mistik dan agama. Keempat, dosa hanya ada pada perempuan. Bila terjadi kesalahan pada keluarga maka perempuanlah yang dituding sebagai penyebab kesalahan. Kelima, bila terjadi kemiskinan, perang dan konflik sosial maka yang menjadi korban terbesar adalah

---

<sup>27</sup>Erna Herawati, "Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Kemasyarakatan Pasca-Reformasi," 2016: 49.

perempuan. Keenam, perempuan dianggap sebagai mesin reproduksi, mesin penghasil anak. Kesehatan dan perasaannya tidak dipedulikan.<sup>28</sup>

Peran perempuan dalam gereja tidak lagi dianggap sebagai hanya memiliki peran sebagai istri dan ibu rumah tangga dan sebagai pendengar. Tetapi perempuan harus aktif mendorong terwujudnya keserasian. Dengan adanya keterlibatan kaum perempuan, gereja mampu membangun keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari.

#### 4. Kesimpulan

Gereja dalam menyikapi realitas sosial saat ini, maka perlu menyelesaikan masalah kemiskinan dalam masyarakat. Gereja harus berupaya memberikan jalan keluar bagi persoalan yang dihadapi masyarakat kini dan di sini. Tidak sekadar melakukan pembagian sembako tetapi perlu menindaklanjuti kehidupan masyarakat dengan melakukan pelatihan baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Respon gereja menghadapi realitas sosial tersebut adalah bekerja dan berjalan bersama dalam semangat kebersamaan dan perasaan setia kawan serta saling mendukung untuk mewujudkan injil kerajaan Allah. Tanggung jawab gereja, adalah: melaksanakan misi dan menyerukan Injil serta terlibat aktif dalam kegiatan sosial; menggiatkan hal berdoa, sebagai pola hidup yang bergantung kepada Allah; mengetahui benar jati diri umat dan merawat persatuan serta keutuhan; mengambil pendirian kritis terhadap nilai-nilai kebudayaan; cara membentuk proses berpikir menjadi satu untuk menunjukkan kesungguhan terhadap adat istiadat. Namun pada kenyataannya gereja belum sepenuhnya melakukan tugas tersebut sehingga perlu mengoreksi diri baik sebagai pribadi maupun sebagai lembaga.

#### Referensi

- Afifah, Nurul. "Problematika Pendidikan Di Indonesia (Telaah Dari Aspek Pembelajaran)." *Elementary* 1, no. 1 (2015): 41–47.
- Darmaputera, Eka, and Victor Silaen. *Gereja Dan Reformasi: Pembaharuan Gereja Menuju Indonesia Baru*. Jakarta: Yakoma-PGI, 2009.
- Daruzman, Marzuki. *Penegakan Hukum Dan HAM Di Era Reformasi*. Jakarta: LP3S, 2000.
- Fransiska, Ni Nyoman. "Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen)." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* (2018): 1–15.
- Harold, Rudy. *Protestan Indonesia Di Gorontalo (GPIG) Dalam Menanggapi Masalah Kemiskinan*. *Jurnal Jaffray*. Vol. 15, 2017.
- Herawati, Erna. "Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Kemasyarakatan Pasca-Reformasi," 2016.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Agama Dan Politik: Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama." *Walisongo* 22, no. 1 (2014): 133–156.
- Khotimah. "Dialog Dan Kerukunan Antar Umat Beragama." *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 2 (July 2011): 214–224.
- Laukapitang, Yunus Daniel Anus. "Teologi Pembangunan Berbasis Pengembangan Masyarakat Shalom Pada Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Kupang Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Jaffray* 14, no. 2 (September 2016): 241.

---

<sup>28</sup> Hetty Siregar, "Persaudaraan Yang Baik Dan Benar," in *Gereja Dan Reformasi: Pembaharuan Gereja Menuju Indonesia Baru*, ed. Eka Darmaputera and Victor Silaen (Jakarta: Yakoma-PGI, 2009). 150.

- Lie, Tan Giok. "Suatu Model Kolaboratif Pendidikan Kristen Terhadap Tantangan Paradigmatik Era Ini." *Stulos* 16, no. 2 (2018): 142–158.
- Mawardi. "Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Kemajemukan Sosial." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (April 2015): 55–66.
- Mirzaqon T, Abdi, and Budi Purwoko. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expresive Writing." *Jurnal BK UNESA* 8, no. 1 (2017): 1–8.
- Ngabalin, Martinus. "Berteologi Kontekstual Dari Perspektif Orang Kei Melalui Konsep Duet." *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (December 2019): 277–293.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Carilah Tuhan Maka Kamu Akan Hidup*. Jakarta: Akademi Leimena, 1999.
- . "Gereja Dan Dunia Pendidikan ." *Web PGI*.
- Saleha, Qoriah. "Kajian Struktur Sosial Dalam Masyarakat Nelayan Di Pesisir Kota Balikpapan." *Buletin PSP* 21, no. 1 (2013): 67–75.
- Samongilailai, Aseng Yulias. "Visi Profetis Bagi Kehidupan Sosial Umat Kristen Dalam Demokratis Menurut John W. De Gruchy." *Epigraphe: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 3, no. 2 (December 2019): 118–132.
- Seda, Franscisia SEE. "Gereja Dan Negara: Refleksi Atas Tantangan Masyarakat Indonesia Dan Pancasila Suatu Pendekatan Sosiologis." *Orientasi Baru* 22, no. 2 (October 2013): 155–186.
- Siahaan, Harls Evan. "Mengajarkan Nasionalisme Lewat Momentum Perayaan Paskah : Refleksi Kritis Keluaran 12 : 1-51." *Dunamis : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1, no. 2 (2017): 140–155. <https://www.stintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/119>.
- Silaen, Victor. "Kristen Dan Kenaifan Politik: Kritik Atas Sikap Politik PGPI Dalam Pilpres 2014." *Societas* 2, no. 1 (2015): 161–208.
- Simanjuntak, Junihot M. "Belajar Sebagai Identitas Dan Tugas Gereja." *Jurnal Jaffray* 16, no. 1 (March 2018): 1.
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Siregar, Hetty. "Persaudaraan Yang Baik Dan Benar." In *Gereja Dan Reformasi: Pembaharuan Gereja Menuju Indonesia Baru*, edited by Eka Darmaputera and Victor Silaen. Jakarta: Yakoma-PGI, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Struktur Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993.
- Titaley, John. A. "Hubungan Gereja Dan Negara." In *Hubungan Gereja Dan Negara Dan Hak-Hak Asasi Manusia Hak-Hak Asasi Manusia*, edited by Weinata Sairin and J.M Pattisina, 39. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.